

# IMPLEMENTASI WEBSITE [BELUKAB.GO.ID](http://belukab.go.id) MELALUI DINAS KOMINFO SEBAGAI LAYANAN INFORMASI DALAM MENINGKATKAN E- GOVERNMENT DI KABUPATEN BELU

Felix Johaness Mau<sup>1</sup>, Eem Nurnawati, SP., M.Si<sup>2</sup>  
NPP.31.0779

Asdaf Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: [31.0644@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0644@praja.ipdn.ac.id)

Email: [eem\\_nurnawati@ipdn.ac.id](mailto:eem_nurnawati@ipdn.ac.id)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background:** In an increasingly advanced era of information technology, where technology and information play a crucial role in all aspects of life, the advancement of science and technology demands that the government realizes electronic-based services (e-services) to enhance electronic governance (e-government), aimed at improving the efficiency, effectiveness, transparency, and accountability of governance, as outlined in Presidential Instruction Number 3 of 2003 concerning e-government Policy and Strategy Development. One of the government's efforts in enhancing e-government is through the utilization of websites. The title of this research is "The Implementation of [belukab.go.id](http://belukab.go.id) Website through the Department of Communication and Informatics as an Information Service in Enhancing E-government in Belu District." **Objective:** The purpose of this study is to understand, describe, and comprehend the implementation of the website as an information service in Belu District, the encountered obstacles, and the efforts made. Therefore, the author can draw conclusions and provide recommendations for improving e-government in Belu District. **Method:** The author employs a qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques used include interviews, observations, and documentation. The data analysis technique used includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The findings of this research reveal that the implementation of information services using websites to enhance e-government has not been optimally executed. **Conclusion:** The implementation of a website as an information service to enhance e-government in Belu Regency has not yet fully operated optimally. This is based on the applied implementation theory, which includes three elements: support, capacity, and benefits. Several challenges have been identified, including weak legal frameworks, very limited human resources, the lack of an independent server, insufficient direct socialization, and the absence of financial resources for website management. The efforts employed to overcome these challenges include drafting a Regent Regulation (Perbub) regarding the website, recruiting competent human resources, acquiring an independent server, increasing socialization to the community, and proposing a special budget for website management.

**Keywords:** Implementation, Information Services, Community, Website, e-government

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Era yang semakin maju dalam teknologi informasi, dimana teknologi dan informasi memegang peranan yang krusial dalam aspek kehidupan. Semakin majunya IPTEK menuntut pemerintah agar mewujudkan pelayanan berbasis elektronik (e-service) untuk meningkatkan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan *e-government*. Dalam meningkatkan *e-government* salah satu upaya pemerintah yaitu menggunakan *website*. Judul dari penelitian ini yaitu “Implementasi *Website* [belukab.go.id](http://belukab.go.id) melalui Dinas Kominfo Sebagai Layanan Informasi dalam Meningkatkan *E-government* di Kabupaten Belu. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami serta menggambarkan bagaimana implementasi *website* sebagai layanan informasi di Kabupaten Belu, hambatan yang ditemukan dan upaya yang sudah dilakukan. Sehingga, penulis dapat membuat kesimpulan dan memberikan saran untuk meningkatkan *e-government* di Kabupaten Belu. **Metode:** Penulis menerapkan pendekatan induktif dalam metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temu dari penelitian ini menyajikan bahwa implementasi pelayanan informasi menggunakan *website* untuk meningkatkan *e-government* belum berjalan secara optimal dan terlaksana dengan baik. **Kesimpulan:** Implementasi *website* sebagai layanan informasi dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Belu belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal ini berdasarkan pada teori penerapan yang digunakan yang meliputi tiga elemen yaitu pendukung, kapasitas dan manfaat yang ditemukan beberapa kendala meliputi: payung hukum yang kurang kuat, SDM yang sangat minim, tidak mempunyai *server* sendiri, kurangnya sosialisasi secara langsung dan belum adanya sumber daya finansial untuk pengelolaan *website*. Upaya yang digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu membuat Perbub tentang *website*, merekrut SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya, mengadakan *server* sendiri, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajukan anggaran khusus untuk pengelolaan *website*.

**Kata Kunci :** Implementasi, Layanan Informasi, Masyarakat, *Website*, *e-government*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era yang semakin maju dalam teknologi informasi, dimana teknologi dan informasi menjadi peranan yang sangat penting dalam aspek kehidupan. Dengan semakin majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pemerintah dituntut agar lebih meningkatkan kinerja khususnya dalam pelayanan berbasis elektronik (e-service) dalam upaya mencapai *good governance* dan tata kelola pemerintahan yang efektif berbasis elektronik (*e-government*).

Berdasarkan hasil survei United Nation *E-government*, yaitu survei yang dirilis setiap dua tahun sekali memberikan peringkat kepada 193 negara anggota PBB berdasarkan tiga aspek kinerja Indeks Pengembangan *E-Government* (EDGI), meliputi Indeks Pelayanan *Online* (OSI), Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII), dan Indeks Sumber Daya Manusia (HCI), tahun 2022 membuktikan Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 11 peringkat dari peringkat 88. di tahun 2020 menjadi peringkat 77 di tahun 2022. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa index pengembangan *e-government* Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat, ini menunjukkan perlunya mewujudkan digitalisasi, terutama dalam sektor pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik dari Aparatur Sipil Negara. Merujuk pada evaluasi tingkat provinsi terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ke 5 sebagai provinsi terbaik dalam penerapan SPBE. Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai sudah cukup berhasil dalam menerapkan *e-government*. Hal itu dapat dilihat dari indeks yang diberikannya yaitu 3,35 dengan predikat baik. Cara pemerintah memberikan layanan *e-government* tersebut salah satunya dengan *website*. Menurut (Reza Palevi, 2013) *website* merupakan koleksi beberapa laman web pada *domain* tertentu yang berisi informasi. Situs web dibuat dari berbagai halaman web yang dihubungkan bersama. Salah satu pemerintah daerah di Indonesia ialah Kabupaten Belu yang menerapkan layanan informasi publik melalui *website* melalui dinas Kominfo sebagai upaya menuju pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan *website* yang dapat diakses dengan alamat *website belukab.go.id* sebagai sarana layanan informasi kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan keterbukaan informasi publik sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Dalam mengembangkan fungsi dan kewenangannya, Diskominfo perlu menggunakan media informasi yang ada untuk mendukung penyebaran informasi terkait program-program prioritas pemerintah (Ayuni, 2020). Hal ini merupakan peran Pemerintah Daerah dalam merealisasikan (*good governance*) dan juga mewujudkan salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pelayanan berbasis elektronik (*e-government*). *Website belukab.go.id* diharapkan mampu untuk menyediakan pelayanan dalam bentuk informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas juga dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Belu.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan Implementasi *website belukab.go.id* sebagai layanan informasi dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Belu. Permasalahan yang pertama yaitu berkaitan dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang *website belukab.go.id* itu sendiri. Hal ini ditunjukkan melalui data dari *website* yang menunjukkan jumlah pengunjung *website* dari bulan Januari-Agustus tahun 2023 berjumlah 4,206 orang. Kemudian data dari BPS Kabupaten Belu menunjukkan persentase penduduk yang mengakses internet dari rentang umur 5 tahun ke atas khususnya pada kabupaten Belu pada tahun 2022 sebesar 46,46%. Jika persentase terakhir dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15 s.d 59 tahun) di kabupaten Belu yaitu sebanyak 142.140 Jiwa (Sumber dari Badan Pusat

Statistik Kabupaten Belu), sebanyak  $\pm$  65 ribu jiwa sudah mengakses internet. Dapat dilihat dari jumlah pengunjung *website* dengan jumlah pengguna internet di kabupaten Belu sangat lah berbanding terbalik. Sehingga dapat dilihat bahwa partisipasi Masyarakat kabupaten Belu masih sangat kurang terhadap *website* [belukab.go.id](http://belukab.go.id) sebagai layanan informasi.

Permasalahan berikutnya yaitu belum adanya peraturan daerah yang mengatur khusus tentang *website* adalah permasalahan lainnya, *website* yang dipergunakan saat ini hanya berlandaskan kepada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga Peraturan Bupati Belu No 27 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berkaitan dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang diteliti penulis. Penulis mempunyai beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi dasar atau landasan yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini dan menjadi acuan dalam menambah wawasan, informasi serta sebagai bahan kajian pada penulisan. Hasil penelitian oleh (Noveriyanto et al., 2018) menemukan bahwa, Pemerintah Kota Surabaya telah mencapai tingkat kematangan tertinggi dalam layanan *e-government*, khususny dalam dimensi PeGI (Pengukuran *Electronic Government* Indonesia). Hal ini merujuk pada fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antara Pemerintah dengan Pemerintah, Pemerintah dengan Masyarakat, dan Pemerintah dengan pelaku bisnis. Evaluasi positif terhadap derajat kesiapan pelayanan *e-government* menunjukkan bahwa Surabaya sudah berhasil meraih tingkat kesiapan yang tinggi dalam menggunakan *E-Government* sebagai sarana komunikasi efektif untuk G2G, G2C, dan G2B.

Penelitian oleh (Regan Vaughan, 2021) menemukan bahwa, pelaksanaan implementasi *E-Government* melalui situs *web* [subang.go.id](http://subang.go.id) dianggap berhasil. Berdasarkan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB), Kabupaten Subang sudah meraih penilaian "Baik" dengan skor Indeks 3,01. Meskipun begitu, pada penerapan *E-Government* melalui *website*, terdapat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kekonstanan dan disiplin dari semua pihak yang terlibat, serta peningkatan jumlah staf pengelola yang memiliki kompetensi yang memadai. Penelitian oleh (Ardiyansah, 2022) mengemukakan bahwa, Penggunaan *e-government* di DPMPTSP Kota Semarang mengedepankan integrasi antar pelayanan *government to government* (G2G), *government to business* (G2B), dan *government to citizen* (G2C) dalam satu sistem pelayanan tunggal. Lingkup *e-government* di DPMPTSP Kota Semarang mencakup tiga aspek, meliputi administrasi elektronik (e-administration), keterlibatan warga elektronik (e-citizen), serta layanan elektronik (e-service). Implementasi situs *web* DPMPTSP Kota Semarang dalam menerapkan *government* telah sukses meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberilayanan perizinan, dan situasi ini terlihat dari peningkatan yang signifikan dalam data statistik kunjungan harian ke situs *web* DPMPTSP.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh (La Tarifu et al., 2022) menemukan bahwa penggunaan situs *web* oleh Pemerintah Kota Kendari sebagai prasarana untuk menyediakan informasi publik telah terbukti berhasil secara efektif.

*Website* tersebut telah memainkan peran yang sangat efisien dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Peran pemerintah sendiri dalam konteks *website* telah terbukti sangat efektif, di mana peran yang dimainkan terhadap *website* mencakup fungsi pengelolaan, pengatur, pengontrol, dan

pengawasan. Isi dari *website* Pemerintah Kota Kendari berhasil menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat terkait berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan dan kebijakan publik. Walaupun terdapat sebagian dari *website* belum sepenuhnya terisi karena keterbatasan sumber daya keuangan yang tidak mencukupi. Terkait interaksi melalui *website* Pemerintah Kota Kendari, meskipun belum terwujud secara langsung di dalam *website* itu sendiri, namun telah diwujudkan melalui berbagai portal aplikasi yang dapat diakses di dalamnya. Sebagai contoh, interaksi antara *government to citizen*, *government to business*, *government to government*, serta *government to employees* dapat diakses melalui portal-portal aplikasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khairi, 2022) menemukan bahwa, Kehadiran situs *web* pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan lebih efektif. Pemanfaatan yang efisien dari situs *web* pemerintah telah menjadikan pencarian informasi tentang pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya lebih mudah bagi masyarakat. Adanya situs *web* pemerintah sudah menghasilkan peluang partisipasi tidak langsung antara pemerintah dan masyarakat, melibatkan penyaluran pesan-pesan pemerintah tentang capaian kinerja yang telah dijalankan hingga saat ini.

Diperlukan peningkatan dalam transparansi informasi karena pengelolaan *website* oleh pemerintah melalui Diskominfo masih melakukan penyortiran informasi sebelum disajikan kepada masyarakat. Dengan adanya *website* pemerintah,

manajemen perubahan menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan karena mereka dapat mengetahui mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rolania Batubara & Helmy, n.d.) dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa perkembangan e-government di Padang Pariaman masih belum optimal. Pengembangan e-government di Kabupaten Padang Pariaman juga masih terhambat oleh beberapa faktor seperti kurangnya kemauan politik yang kuat, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur serta kurangnya anggaran dari pemerintah sehingga Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung keberhasilan pengembangan e-government di Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2023) pemerintah Desa Kertabasuki Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka akan terus berusaha berperan untuk dapat meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya pada pelayanan informasi dan komunikasi menggunakan pelayanan publik dengan media sosial berupa situs web. E-Government berperan penting bagi semua pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan E-Government dan struktur informasi di Desa

Kertabasuki dalam peningkatan pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nuralim & Navasari, n.d.) menemukan bahwa efektifitas sistem informasi Desa Kertayasa dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Jika tidak ada Generasi agent of change dari Universitas Galuh, tata kelola website desa tidak akan efektif dan efisien. Peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Desa Kertayasa untuk melakukan kolaborasi dalam tata kelola website dengan berbagai Institusi yang ada di Kabupaten Ciamis, serta mendorong SDM Desa untuk mengikuti pelatihan khususnya di bidang IT.

Penelitian selanjutnya dilakukan (Wijayanti Sutopo et al., n.d.), adapun hasil temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa Disdikbud Jawa Tengah belum memiliki SOP yang secara khusus mengatur implementasi e-Government. Ketiadaan SOP ini berdampak signifikan pada berbagai aspek lainnya dan menyebabkan hambatan, terutama dalam struktur birokrasi. Disdikbud Jawa Tengah juga menghadapi kendala lain, seperti kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas yang memadai. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan e-Government di instansi ini belum berhasil dan masih terdapat banyak hambatan yang harus diatasi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Likuwatan et al., 2023) menunjukkan bahwa Penerapan e-government berbasis website di Desa Jatirejoyoso masih dalam tahap persiapan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dan anggaran agar bisa berkembang ke tahap selanjutnya, yaitu pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

#### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan penulis yakni tentang implementasi *website* layanan informasi berbasis *website* dalam meningkatkan *e-government*. Metode yang digunakan juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardiyansah, 2022). Perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan teori *Harvard JFK School of Government* - dalam (Indrajit, 2016) yang menyatakan bahwa terdapat 3 elemen utama dalam mengukur tingkat keberhasilan penerapan *e-government* yang meliputi elemen *Support*, *Capacity*, dan *Value*, yang berbeda dengan teori yang dipakai dalam penelitian oleh Noveriyanto dkk, Regan Vaughan, Ardiyansah, La Tarifudkk, Khairi, Setiawan dkk, dan Wijayanti Sutopo dkk. Selain perbedaan pada teori yang digunakan juga terdapat perbedaan pada lokasi atau tempat berlangsungnya penelitian ini yang berbeda dengan lokasi dari penelitian terdahulu.

#### 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi *website* [belukab.go.id](http://belukab.go.id), faktor penghambat implementasi *website* [belukab.go.id](http://belukab.go.id), dan upaya yang dilakukan Dinas Kominfodalam mengatasi hambatan yang ditemukan dalam implementasi *website* [belukab.go.id](http://belukab.go.id) sebagai layanan informasi dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Belu.

## II. METODE

Ruang lingkup penelitian yang akan dikembangkan oleh penulis sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif yang berarti penulis melakukan penelitian berdasarkan pada fakta empirik untuk menentukan kebenaran yang bersifat umum (Sugiyono, 2019). Menurut (Hardani, n.d.) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian untuk mengungkap konflik gejala secara holistic-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar belakang dan penulis sebagai instrument kunci. Penulis membatasi lingkup penelitian hanya pada

tiga dimensi yaitu kemampuan pengembangan *e-government* menurut Eko Indrajit (2016) dengan 3 dimensi yaitu elemen pendukung (*Support*), elemen kapasitas (*Capacity*) dan elemen hasil (*Value*). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, Kepala Infrastruktur dan Teknologi, Kepala Bidang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik, 1 Operator/Staff Pengelola *Website* dan 6 Masyarakat Pengguna *website* belukab.go.id.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian penulis dapat setelah penulis melakukan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis mengolah dan menganalisis data tersebut dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Penulis menggunakan teori Elemen Sukses Penerapan *E-government* oleh Prof. Richardus Eko Indrajit, yang mana dalam teori tersebut terdapat 3 elemen utama yaitu:

#### 3.1 Elemen Pendukung (*Support*)

Elemen *support* merupakan elemen awal dan sangat penting yang harus dimiliki yaitu aspirasi dari sejumlah pejabat publik dan politisi agar sungguh-sungguh mengimplementasikan pemerintah elektronik (*e-government*), tidak sekedar mengikuti *trend* semata atau bahkan menolak usaha yang terkait dengan prinsip-prinsip *e-government*. Adapun bentuk dukungan yang bisa diberikan yaitu sebagai berikut:

##### a. Kebijakan atau Aturan yang Mengatur Implementasi *E-Government*

Menjalankan atau mengoperasikan suatu sistem kerja tentunya memerlukan dukungan dari pihak pemerintah terkait dengan sistem kerja yang bersangkutan. Oleh sebab itu, upaya pemerintah Kabupaten Belu dalam menerapkan *website* sebagai layanan informasi untuk meningkatkan *e-government* di wilayah tersebut menjadi indikator nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan *electronic government* di Kabupaten Belu.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang implementasi *website* sebagai layanan informasi dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Belu belum memiliki kekuatan yang memadai. Hal ini dapat diperjelas dengan belum adanya Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang *website*. Kalaupun ada itu hanya mengacu pada Surat Keputusan Bupati yang memberikantugas kepada Diskominfo untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui situs [web.belukab.go.id](http://web.belukab.go.id), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Pembangunan *E-Government*, Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peraturan Bupati Belu Nomor 27 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

##### b. Kemampuan Organisasi dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Suatu Sistem

Berlangsungnya suatu sistem dalam suatu organisasi tentunya tidak terlepas dari cara dan kemampuan organisasi tersebut dalam menerapkannya untuk suatu peningkatan yang

signifikan. Hal yang sama juga yang dibutuhkan dalam peningkatan *e-government* di Kabupaten Belu melalui *website* [belukab.go.id](http://belukab.go.id) yang mana diperlukan peran penting organisasi untuk mempublikasikan atau mensosialisasikan informasi tentang penggunaan situs *web* sebagai layanan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa implementasi situs *web* sebagai sarana pelayanan informasi untuk meningkatkan *e-government* di Kabupaten Belu belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu karena bentuk sosialisasi yang dilakukan hanya melalui *link* yang disebar di Grup Whatsapp, atau lewat akun facebook. Sosialisasi yang intensif berdasarkan hasil wawancara di atas hanya dilakukan kepada sesama OPD ketika melakukan suatu pertemuan atau rapat.

### 3.2 Elemen Kapasitas (*Capacity*)

Elemen *capacity* ialah komponen kemampuan atau pemberdayaan dalam mewujudkan tujuan *e-government* menjadi kenyataan. Pemerintah harus memiliki tiga hal terkait dengan elemen ini:

#### a. Ketersediaan Sumber Daya Finansial yang Memadai

Sumber daya finansial sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi *website* sebagai layanan informasi. Dengan dukungan keuangan yang memadai, dapat memastikan pengembangan, pemeliharaan, dan pemasaran *website* dilakukan secara optimal. Tanpa sumber daya finansial yang memadai, risiko kegagalan implementasi *website* dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pengguna dapat meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa terkait sumber daya finansial yaitu belum adanya anggaran khusus untuk pengelolaan *website*, sehingga implementasi layanan informasi dalam meningkatkan *e-government* berbasis *website* belum optimal. *Website* yang ada saat ini hanya dikelola secara mandiri oleh Diskominfo Kabupaten Belu. Anggaran yang disiapkan hanya untuk menyewa dan mengelola server.

#### b. Ketersediaan Sumber Daya Infrastruktur yang Memadai

Keberhasilan penerapan *e-government* sebagian besar ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, yang mencakup 50% dari faktor penentu. Tanpa dukungan infrastruktur yang mencukupi, implementasi layanan informasi dalam meningkatkan *e-government* berbasis *website* akan terhambat. Infrastruktur yang baik memastikan *website* dapat menangani jumlah pengunjung yang besar, memberikan kinerja yang cepat, dan menjaga ketersediaan layanan. Berdasarkan hasil penelitian,

penulis menemukan bahwa infrastruktur untuk mengelola *website* sebagai layanan informasi dalam meningkatkan *e-government* sudah memadai di mana terdapat 21 unit Komputer /PC, dan laptop 14 unit. Meskipun tidak semua laptop atau PC tersebut digunakan untuk mengelola *website*, namun terdapat minimal 2 unit PC atau laptop untuk mengelola *website*.

#### c. Sumber Daya Manusia yang Berkompeten

Sumber daya manusia yang berkompeten sangat krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi *website* sebagai layanan informasi untuk meningkatkan *e-government*. Sumber daya manusia yang unggul akan menjadi pendorong utama peningkatan *e-government*, dan sementara kekurangan keterampilan dan

kapasitas dalam sumber daya manusia dapat menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *e-government* sejalan dengan keberdayaan sumber daya manusia yang memadai, sedangkan kelemahan dalam hal ini dapat menghambat perkembangan positif *e-government*.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, ditemukan bahwa kompetensi pegawai yang memiliki keterampilan di bidang Teknologi dan Informasi tersebut masih belum mencukupi bahkan boleh dikatakan sangat kurang dan minim sekali untuk pengelolaan sebuah *website* pemerintah daerah. Maka, diperlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam mengelola *website* belukab.go.id. Pada tabel 1 dan 2 di bawah ini penulisan menampilkan jumlah pegawai Kominfo berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan dan berdasarkan latar belakang pendidikan.

**Tabel 1.**  
**Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan							Ket
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Dinas			1					
2	Sekretaris			1					
3	Kepala Bidang			4					
4	Kepala Subbag			1	1				
5	Kepala Seksi			3		2			
6	Pranata Teknologi Informasi Komputer			1		1			
7	Pengolah Data dan Informasi				1				
8	Tenaga Kontrak			2		1			
	Jumlah			13	2	4			

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu*

Berdasarkan data pada tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu merupakan lulusan S1 (Strata 1) dengan jumlah 13 (dua belas) orang dari total pegawai 19 (sembilan belas) orang ditambah tenaga kontrak. Data di atas menunjukkan sumber daya aparatur berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu belum cukup memadai karena dapat dilihat bahwa tidak ada satupun yang merupakan lulusan S2 (Strata 2) apalagi S3 (Strata 3) ditambah lagi masih terdapat jabatan-jabatan tertentu yang masih lowong atau belum terisi sepenuhnya sehingga harus dilakukan perekrutan pegawai.

dibawah menunjukkan Pegawai Diskominfo berdasarkan latar belakang pendidikannya

**Tabel 2.**

**Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1	2
Sosial	3
Ilmu Pemerintahan	1
Ekonomi	4
Teknik	1
Teknik Informatika	1
Sastra	1
Hukum	2
Ahli Muda dan Ahli Madya	2
Umum (SMA)	4
Jumlah	19

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

Dilihat dari **Tabel 2**, dapat dilihat pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sama, salah satunya yang berlatar belakang pendidikan di bidang IT hanya satu orang dan pegawai tersebut bukanlah sebagai orang yang mengelola [website belukab.go.id](http://belukab.go.id). Berdasarkan **Tabel 1 dan Tabel 2** tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini orang yang dapat mengelola [website](http://belukab.go.id) dinilai masih sangat minim atau belum memadai dan yang mana ditemukan bahwa pegawai yang berlatar belakang pendidikan di bidang Teknologi Informatikanya 1 (satu) orang, namun pegawai tersebut bukanlah pengelola [website](http://belukab.go.id). Justru yang menjadi pengelola [website belukab.go.id](http://belukab.go.id) adalah seorang yang berlatar belakang pendidikan bukan di bidang IT, melainkan dari lulusan sarjana Ekonomi.

### 3.3 Elemen Hasil (Value)

Jika tidak ada yang merasakan manfaat dari penerapan *e-government*, berbagai upaya untuk mewujudkannya akan menjadi sia-sia. Masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (demand side) adalah yang menentukan seberapa besar manfaat *e-government*.

#### a. Manfaat bagi pemerintah

Manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dalam implementasi [website](http://belukab.go.id) sebagai layanan informasi dalam meningkatkan *e-government* yaitu dengan adanya [website](http://belukab.go.id) ini pemerintah Kabupaten Belu bisa menghambat anggaran yang digunakan untuk menyebarkan informasi sehingga anggaran yang ada bisa dialokasikan untuk keperluan lain yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Juga adanya [website belukab.go.id](http://belukab.go.id) ini sebagai wujud keterbukaan atau transparansi dari pemerintah Kabupaten Belu.

b. Manfaat bagi masyarakat

Adapun manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna *website* yaitu masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan informasi atau berita seputar jalannya pemerintahan di Kabupaten Belu mulai dari agenda pimpinan sampai berjalannya kegiatan tersebut. Masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan yang diinginkan karena terdapat beberapa pelayanan yang bisa diakses melalui [website belukab.go.id](http://website.belukab.go.id) seperti pelayanan untuk mencari lowongan pekerjaan dan pelayanan perizinan untuk usaha.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi layanan informasi berbasis *website* dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Belu membawadampak yang cukup positif bagi masyarakat dengan menyediakan keterbukaan informasi publik, sehingga menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari tiga elemen sukses penerapan *e-government* yaitu elemen pendukung, elemen kapasitas, dan elemen hasil. Meskipun terdapat elemen yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya misalnya aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek finansial, namun yang aspek telah berjalan dengan baik harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dan yang belum baik agar diperbaiki dan diadakan.

## IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Implementasi *website* sebagai layanan informasi dalam upaya meningkatkan *e-government* di Kabupaten Belu secara keseluruhan belum berjalan secara optimal. Dapat diamati dari teori Indrajit yang terbagi menjadi 3 elemen/unsur yakni unsur Pendukung (Support), unsur Kapasitas (Capacity), dan unsur Hasil (Value) yang berdasarkan hasil penelitian ditemukan masih terdapat beberapa hambatan atau kendala yang perlu diperbaiki, diadakan dan ditingkatkan dan upaya untuk mengatasi hambatan atau masalah yang ditemukan tersebut.

**Keterbatasan Penelitian,** keterbatasan utama dari penelitian ini adalah waktu, sehingga penulis hanya dapat mengidentifikasi masalah secara umum dan belum dapat melakukan penelitian mendalam. Selain itu, penulis juga menyadari bahwa jumlah referensi dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang memadai.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work),** Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih bersifat awal. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa mengenai implementasi layanan informasi berbasis *website* dalam meningkatkan *e-government* di Kabupaten Belu, guna memperoleh hasil yang lebih mendalam. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mencari lebih banyak referensi dan sumber yang akurat terkait dengan topik penelitian ini.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada pemerintah Kabupaten Belu khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu beserta jajarannya, yang

telahmemberikankesempatanbagipenulisuntukmelaksanakanpenelitian. Penulis juga mengucapkanlimpahterimakasihkepada Bapak Drs. H. Asmungi, SH., M.Si, Bapak Ir.Murdiyana, M.Si, dan Ibu Eem Nurnawati, SP., M.Si, yang telahmembimbingpenulisdalammenyelesaikan tulisan ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyansah, M. (2022). Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang). *Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 7(1).
- Ayuni, R. D. (2020). Manajemen Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. *As Siyasa*, 5(2).
- Hardani, A. N. H. , A. H. , U. R. A. F. J. , U. E. F. , S. D. J. , & R. R. I. (n.d.). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. In Pustaka Ilmu (Issue March).
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep Dan Strategi Electronic Government*. Andi.
- Khairi, A. (2022). *PEMANFAATAN WEBSITE PEMERINTAH (E-GOVERNMENT) KABUPATEN ACEH JAYA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)*. UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- La Tarifu, Taufik, & Nani Eka Pertiwi. (2022). EFEKTIVITAS PEMANFAATAN WEBSITE PEMERINTAH KOTA KENDARI SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK. *Journal Publicuho*, 5(3). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.21>
- Likuwatan, A., Hasan Bisri, M., Tri Asmoro, B., Islam Raden Rahmat Malang Jl Raya Mojosari No, U., Kepanjen, K., Malang, K., & Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Jl Panji No, B. (2023). *ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BERBASIS WEBSITE DI DESA JATIREJOYOSO KABUPATEN MALANG*.
- Noveriyanto, B., Nisa, L. C., Bahtiar, A. S., Sahri, S., & Irwansyah, I. (2018). E-GOVERNMENT SEBAGAI LAYANAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1). <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1371>
- Nuralim, I., & Navasari, S. (n.d.). *EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS E-GOVERNMENT DI DESA KERTASAYA KECAMATAN PANAWANGAN*. <http://kecamatan-panawangan>.
- Regan Vaughan, H. B. A. A. P. (2021). *Implementasi Kebijakan e- Government melalui Website Subang.Go.Id Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang*.
- Reza Palevi, A. (2013). ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS WEBSITE PADA SMP NEGERI 2 MOJOSONGO BOYOLALI. *Jurnal Ilmiah DASI*, 14.

Rolania Batubara, E., & Helmy, H. (n.d.). *ANALISIS PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI PENYELENGGARAAN WEBSITEDI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.*

Setiawan, A., Halimah, M., & Faidah, R. N. (2023). Implementasi E-Government Berbasis Situs Web. *Indonesian Journal of Education and Social Sciences*, 2(1), 7–12. <https://doi.org/10.56916/ijess.v2i1.353>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.

Wijayanti Sutopo, I., Wijayanto, & Yuwono, T. (n.d.). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS E-GOVERNMENT DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH.*

